eJournal Pemerintahan Integratif, 2023,10(1): 23-34
ISSN 2317-8670 (online), ISSN 2337-866 (print), ejournal.pin.or.id
©Copyright 2023

ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM PETA RAWAN BENCANA DIDALAM MENDUKUNG MITIGASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG

Ayu Khaerunnisa

eJournal Pemerintahan Integratif
Volume 10, Nomor 1, 2023

eJournal Pemerintahan Integratif, 2023,10(1): 23-34
ISSN 2317-8670 (online), ISSN 2337-866 (print), ejournal.pin.or.id
©Copyright 2023

ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM PETA RAWAN BENCANA DIDALAM MENDUKUNG MITIGASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG

Ayu Khaerunnisa[1], Budiman[2]

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme kerja BPBD Kota Bontang dalam mengumpulkan data lokasi rawan bencana, mengolah data lokasi rawan bencana dan menyajikan Peta Rawan Bencana dalam mitigasi bencana di Kota Bontang serta dampak Peta Rawan bencana RT terhadap bencana di Kota Bontang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu Observasi, Wawancara dan Studi Pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan secara mendalam mengenai mekanisme kerja BPBD Kota Bontang dalam upaya mitigasi bencana di Kota Bontang. Analisis data model interaktif dari B. Milles dan A. Huberman, yang diawali dengan reduksi data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peta Rawan Bencana telah berupaya di dalam memaksimalkan peran unsur penting Pemerintahan didalam upaya kevalid-tan data; melaksanakan pengsinkronasian data; melakukan upaya uji kevalid-tan data dengan cara melaksanakan uji publik; Peta Rawan Bencana menjadi bagian dari petunjuk masyarakat Kota Bontang didalam memulai tata kelola pembagunan yang terstruktur, mengurangi potensi terjadinya bencana, berupaya mengurangi korban jiwa serta mengurangi kerugian sarana dan prasarana karena Peta Rawa Bencana RT dilengkapi dengan dokumentasi yang yang berfungsi menjelaskan kerawanan yang terjadi. Peta Rawan Bencana menghasilkan fungsi penguatan kapasitas bagi masyarakat seperti pelaksanaan pelatihan simulasi kebencanaan. Penurunan data banjir kiriman menunjukkan sebuah keberhasilan dari dampak solusi yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh Peta Rawan Bencana kepada DLH yang menangani pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Kata Kunci : bencana, mitigasi, peta rawan bencana

[1] Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ayukhaerunnisa12@gmail.com
[2] Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang rawan mengalami bencana. Didalam "Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007" Tentang Penanggulangan Bencana, "Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana yang diakibatkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana yang diakibatkan oleh faktor non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit."

Kota Bontang yang terletak antara 117º23' Bujur Timur - 117º38' Bujur Timur serta pula diantara 0º01' Lintang Utara - 0º012' Lintang Utara. Wilayah Kota Bontang ini didominasi lautan. Kota Bontang memiliki pula luas wilayah seluruhnya 497,57 km² daratan seluas 147,8 km² (29,70%) dan lautan seluas 349,77 km² (70,30%), didukung dengan tata letak yang cukup strategis yaitu terletak pada jalan trans Kalimantan Timur juga berbatasan langsung dengan selat makassar yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) dan internasional sehingga menguntungkan dalam mendukung interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah lain diluar Kota Bontang baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Layaknya wilayah Indonesia pada umumnya, Kota Bontang terletak di daerah yang tropis dengan dua musim, yakni panas dan hujan, yang memiliki ciri-ciri perubahan suhu, cuaca, serta arah angin yang cukup ekstrim; Kondisi inilah yang dapat menimbulkan beberapa dampak buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometereologi seperti kebakaran hutan, kekeringan, tanah longsor, putting beliung, banjir, dan Gagal Teknologi. Didasarkan pada data yang ditetapkan oleh BNPB, "Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)", Kota yang dijuluki Kota Taman ini memiliki kelas risiko kategori yang cukup Tinggi dengan skor 150. Hal ini menjadikan Kota Bontang memiliki kelas risiko "tinggi" dapat diartikan tingkat potensi ancaman bencana di Kota Bontang terhitung berbahaya, yang wajib menjadi perhatian penting dan prioritas Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Bontang dalam penanganan penanggulangan bencana. Kota Bontang juga memiliki 12 (dua belas) potensi ancaman bencana dengan 9 (sembilan) jenis diantaranya pernah terjadi di Kota Bontang sehingga perlu diupayakan sebuah regulasi sebagai pencegahan agar dapat meminimalisirkan dan mengurangi dampak ataupun korban jiwa akibat bencana tersebut. Jenis-jenis potensi ancaman bencana di Kota Bontang adalah banjir, kebakaran hutan/lahan, tanah longsor, gagal teknologi, wabah penyakit, bencana sosial (konflik sosial), angin putting beliung, kecelakaan transportasi, tsunami (gelombang tinggi) dan gempa bumi. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah

kejadian dan intensitas bencana hidrotemereologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi silih berganti di Kota Bontang.

Menanggapi hal tersebut Mitigasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas pengomandoan, pengoordinasian dan pelaksanaan dalam penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah khususnya Kota Bontang dan sekitarnya mengambil kebijakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Didalam Pasal 1 (9) UU 24/ 2007 Tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan "Mitigasi bencana adalah segala Upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Terdapat dua jenis mitigasi yaitu struktural dan nonstruktural. Mitigasi struktural dilakukan dengan membangun prasarana fisik menggunakan teknologi. Contoh mitigasi ini adalah pembangunan waduk, alat pendeteksi aktivitas gunung api, sistem early warning untuk mendeteksi gelombang tsunami, serta bangunan tahan bencana. Selain itu, mitigasi non struktural dengan merumuskan kebijakan dan peraturan mengenai penanggulangan bencana, seperti Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan pembuatan tata ruang kota."

Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pasal 3 Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota salah satunya mengenai Pelayanan informasi rawan bencana serta mengacu pada salah satu Indikator Kinerja didalam Rencana Strategis BPBD Kota Bontang 2022-2026 sesuai Tugas dan Fungsi yaitu Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana sehingga BPBD Kota Bontang berinovasi merancang Peta Rawan Bencana sebagai upaya implementasi dari Peraturan tersebut yang diharapkan saran, masukan dan tindakan dari BPBD Kota Bontang yang dituangkan dalam program Peta Rawan Bencana dapat menjadi salah satu pertimbangan pengambilan keputusan didalam membantu Pemerintahan Kota Bontang untuk mewujudkan peraturan dan harapan tersebut serta Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Bontang dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang salah satunya pada Misi "Kota Bontang yang berkelanjutan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup". Dengan cara mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penanggulangan bencana baik pencegahan, penanganan darurat, pasca bencana, serta penyelenggaraan kebutuhan penanggulangan bencana dengan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien dalam mewujudkan Kota Bontang yang layak huni dan berwawasan lingkungan.

Peta Rawan Bencana ini merupakan data berisikan lokasi titik rawan bencana yang ada di setiap RT yang berada di Kota Bontang. Pengembangan Peta Rawan Bencana dengan Pemasangan titik koordinat yang telah dilakukan survei

oleh anggota lapangan BPBD Kota Bontang akan menjadi pedoman BPBD Kota Bontang dalam memperhitungkan jarak dan lokasi serta memperhitungkan jarak tempuh saat terjadinya bencana di wilayah Kota Bontang sehingga penyelamatan dan pengevakuasian kebencanaan dapat dilakukan dengan tepat, cepat dan akurat

Dengan adanya Peta Rawan Bencana yang menjadi sebuah acuan didalam menentukan program kerja di setiap bidang-bidang prestasi yang telah didapatkan oleh BPBD Kota Bontang, sehingga dalam menyusun dan melaksanakan program kerja pada tiap-tiap bidang tersebut terlaksana secara terencana, terstruktur dan terukur karena Peta Rawan Bencana merupakan sebuah pedoman yang menjadi penuntun didalam perencanaan program kerja dan bergeraknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang didalam melakukan penanggulangan bencana di daerah Kota Bontang dan output Peta Rawan Bencana akan kembali kepada masyarakat itu sendiri karena data dan informasi yang ada di Peta Rawan Bencana akan menjadi jawaban tindakan ketika sebelum terjadinya bencana warga untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri lebih dulu didalam menghadapi bencana.

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut dengan judul "Analisis Kebijakan Program Peta Rawan Bencana didalam mendukung Mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang" untuk menganalisis mekanisme dari terancangnya sebuah Peta Rawan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang.

Kerangka Dasar Teori

Pemerintahan

Menurut R. Mac Iver (dalam Inu Kencana Syafiie, 2003:135), "Pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintah sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada". Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang mungkin setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Analisis

Menurut (Dunn, 2004) "Analisis diperlukan untuk mengetahui substansi kebijakan yang mencakup informasi mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan dan dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan".

1. Fungsi Analisis

Analisis memiliki sedikitnya sedikitnya tiga fungsi analisis yaitu:

1). Analisis berfungsi untuk menguraikan sesuatu menjadi komponenkomponen kecil yang diketahui hubungan-hubungannya.
2). Analisis bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih mendetail mengetahui suatu hal.
3). Analisis juga memiliki fungsi dan tujuan untuk menentukan keputusan.
4). Analisis berfungsi untuk menguraikan sesuatu menjadi komponenkomponen kecil yang diketahui hubungan-hubungannya.
5). Analisis berfungsi untuk menguraikan sesuatu menjadi komponenkomponen kecil yang diketahui hubungan-hubungannya.

Kebijakan

Kebijakan, menurut Titmuss (dalam Suharto, 1997), "Senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-oriented)." Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Analisis Kebijakan

Suharto (2010:85) mengatakan bahwa "Analisis kebijakan sebagai usaha yang terencana dan sistematis dalam membuat analisis atau asesmen akurat mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan, baik sebelum maupun sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan."

Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan Publik Menurut William N. Dunn (2000), bahwa "Hubungan antara komponen-komponen informasi kebijakan dan metode-metode analisis kebijakan memberikan landasan untuk membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan, yaitu : analisis kebijakan prospektif, analisis kebijakan restrospektif, dan analisis kebijakan terintegrasi.

Bencana

Menurut (Soehatman, 2011: 10) mendefinisikan "Bencana adalah suatu kejadian yang ekstrem dalam lingkungan alam atau manusia yang secara langsung merugikan mempengaruhi kehidupan manusia, harta benda atau aktivitas sampai pada tingkat yang menimbulkan bencana". Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bencana merupakan segala sesuatu yang menyebabkan terganggunya kehidupan manusia sehingga dapat merugikan baik secara material maupun non material.

Mitigasi

Konsep Mitigasi terangkum pada (Pasal 1 (9) UU 24/ 2007) Tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan "Mitigasi bencana adalah segala Upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik

maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana."

1) Pemetaan

Langkah pertama dalam strategi mitigasi adalah memetakan daerah rawan bencana. Saat ini berbagai sektor telah mengembangkan peta rawan bencana. Peta rawan bencana sangat berguna bagi para pengambil keputusan terutama dalam mengantisipasi kejadian bencana alam. Namun, hingga saat ini penggunaan peta tersebut belum dioptimalkan.

2) Pemantauan

Dengan mengetahui tingkat kerentanan secara dini dapat diantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, sehingga akan dengan mudah melakukan penyelamatan. Pemantauan di wilayah vital dan strategis di bidang pelayanan dan ekonomi dilakukan di beberapa wilayah rawan bencana.

3) Penyebaran informasi

Penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan memberikan poster dan leaflet kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia yang rawan bencana, tentang tata cara pengenalan, pencegahan, dan penanganan bencana. Pemberian informasi kepada media cetak dan elektronik tentang bencana merupakan salah satu cara penyebaran informasi dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan bencana geologi di suatu wilayah tertentu. Koordinasi pemerintah daerah dalam hal penyebaran informasi sangat diperlukan mengingat Indonesia yang sangat luas.

4) Sosialisasi dan Konseling

Sosialisasi dan Konseling, semua aspek kebencanaan kepada SATKOR-LAK PB, SATLAK PB, dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana setiap saat. Hal penting yang perlu diketahui oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah adalah tentang hidup harmonis dengan alam di daerah bencana, apa saja yang perlu dilakukan dan dihindari di daerah rawan bencana, serta mengetahui cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana.

5)Pelatihan / Pendidikan

Pelatihan difokuskan pada tata cara evakuasi dan penyelamatan jika terjadi bencana. Tujuan dari latihan ini adalah untuk mempertegas arus informasi dari petugas lapangan, petugas teknis, SATKORLAK PB, SATLAK PB, dan masyarakat ke tingkat evakuasi dan penyelamatan korban bencana. Dengan pelatihan ini terbentuklah kesiapsiagaan tinggi dalam menghadapi bencana.

6) Peringatan Dini

Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan pengamatan secara terus menerus di suatu daerah rawan dengan tujuan agar dapat dilakukan persiapan dini untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Peringatan dini tersebut disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dengan tujuan memberikan kesadaran masyarakat dalam menghindari bencana. Hasil peringatan dini dan pemantauan daerah rawan bencana dalam bentuk nasehat teknis dapat berupa cara lain untuk mengalihkan jalur jalan (sementara atau seterusnya), evakuasi dan atau relokasi, dan rekomendasi penanganan lainnya.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif karena kualitatif bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses yang dimana penelitian ini mengartikan dalamnya hubungan antar aspek yang diteliti dengan variabel yang diteliti bersifat interaktif atau saling mempengaruhi, penelitian ini juga lebih tepat untuk memilih kualitatif karena bersifat deskriptif atau menjelaskan dengan kata-kata dan gambar.

Hasil Penelitian

1. Program Peta Rawan Bencana BPBD Kota Bontang pada pelaksanaan pengumpulan data daerah rawan bencana telah berupaya dalam memaksimalkan peran unsur penting Pemerintahan didalam upaya kevalid-tan data mulai dari Ketua RT dan atau pengurus RT dimana peran dari mereka sebagai sumber informasi dari warga-warga yang didaerahnya memiliki potensi bencana, unsur Kelurahan yang berperan menjadi Koordinator didalam 1 (satu) bagian daerah dibawah kepengurusan Kelurahan sehingga menghubungkan koordinasi dari pihak BPBD Kota Bontang ke Ketua RT dan atau pengurus RT

2. Program Peta Rawan Bencana BPBD Kota Bontang dalam proses pengolahan data peta rawan bencana telah melaksanakan pengsinkronasian data dengan melalukan rapat koordinasi anggota lapangan, tim data bersama unsur pimpinan dan seluruh staff BPBD Kota Bontang yang memiliki kompetensi didalam bidang penanggulangan kebencanaan untuk merundingkan saran, masukan dan tindakan sebagai upaya jalan keluar dari permasalahan daerah rawan bencana

3. Program Peta Rawan Bencana BPBD Kota Bontang dalam proses penyajian Peta Rawan Bencana telah melakukan upaya uji kevalid-tan data kepada warga, Ketua RT dan atau pengurus RT, Kelurahan dan tokoh adat yang berdomisili didaerah yang dipantau dengan cara melaksanakan uji publik guna pada saat penyampaian data Peta Rawan Bencana RT seluruh unsur tersebut dapat mengetahui informasi data daerah kerawanan tersebut dan mengkoreksi data Peta Rawan Bencana namun pada pelaksanaan hasilnya uji publik menjadi sarana

informasi kepada warga yang justru tidak mengetahui bahwa daerah yang menjadi titik rawan akan bencana tersebut dan juga tidak mengetahui bahwa daerah rawan tersebut menjadi bagian dari daerah RT-nya.

Gambar 1. Peta Rawan Bencana BPBD Kota Bontang

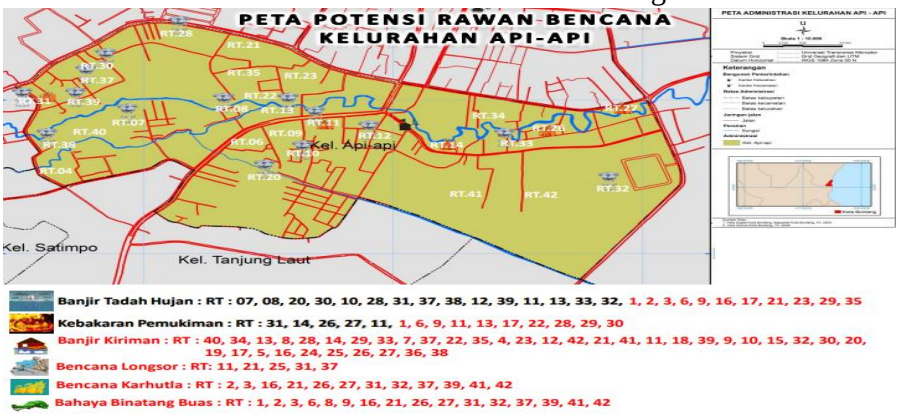

Sumber : BPBD Kota Bontang Tahun 2017
(Peta Rawan Bencana beserta masukan saran dan tindakan)

4. Dampak Program Peta Rawan Bencana oleh BPBD Kota Bontang tercatat bencana banjir dalam hal ini terjadi pada jenis banjir kiriman mengalami penurunan hingga 0 kejadian dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

Jenis Bencana	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Banjir		4	7	3	8	4
Banjir Tadah Hujan		2	5		7	4
Banjir Kiriman		2	2	3	1	
Banjir Rob						
Kebakaran Pemukiman	15	10	9	9	16	7
Kebakaran Hutan dan Lahan	92	63		14	65	57
Kebakaran Lainnya	6	14		2	1	1
Tanah Longsor		1		4	4	
Puting Beliung			2			
Kecelakaan Transportasi		3	4	6	9	3
Lainnya	2	23	2	6	1	2

Sumber : Tim Data BPBD Kota Bontang Tahun 2021
(Data Jumlah Kejadian Bencana Kota Bontang)

Penurunan ini diketahui didasarkan pelaksanaan Program Kali Bersih (PROKASIH) atau normalisasi aliran air sungai Kota Bontang yang dilakukan di beberapa titik di Kota Bontang.

Sumber : BPBD Kota Bontang Tahun 2019
(Data titik lokasi pelaksanaan normalisasi aliran air sungai Kota Bontang)

Kesimpulan

1. Peta Rawan Bencana RT menjadi bagian dari petunjuk masyarakat Kota Bontang didalam memulai tata kelola pembagunan yang terstruktur, mengurangi potensi terjadinya bencana, berupaya mengurangi korban jiwa serta mengurangi kerugian sarana dan prasarana karena Peta Rawa Bencana RT dilengkapi dengan dokumentasi yang fungsinya dapat menjelaskan kerawanan yang terjadi, saran masukan dan tindakan yang dapat menjadi arahan masyarakat didalam mengambil langkah penanggulangan selanjutnya
2. Peta Rawan Bencana RT menghasilkan fungsi penguatan kapasitas bagi masyarakat seperti pelaksanaan pelatihan simulasi kebencanaan. Sebagai contoh berkat dari Peta Rawan Bencana ini survei dari wilayah-wilayah yang rawan akan bencana pengerukan sedimen yang ada di alur sungai sebagaimana rekomendasi yang BPBD Kota Bontang kepada DLH yang menangani pengelolaan sungai termasuk Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kota Bontang menunjukkan data banjir kiriman menurun

mengartikan dampak solusi yang ditawarkan dan dilaksanakan dari Peta Rawan Bencana berhasil.

3. Dampak dari kehadiran Peta Rawan Bencana yang dirasakan oleh salah satu Organisasi Perangkat Daerah yaitu Bappaletibang, untuk digunakan data-data dari Peta Rawan Bencana yang dimana didalam Peta Rawan Bencana sudah diidentifikasi oleh BPBD memperlihatkan zona-zona rawan bencana seperti misalnya zona banjir, yang dalam hal ini dapat membantu penyusunan dokumen perencanaan tata ruang oleh Bappelitbang untuk mengiplementasikan rencana tata ruang Bappelitbang yaitu perda RTRW (Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah)
4. Dampak yang terasa dimasyarakat melalui Pelaksaan Uji Publik yang dilakukan disetiap Kelurahan di Kota Bontang membuka mindset warga betapa pentingnya memilki apar sendiri dirumah atau belajar bagaimana cara penanganan pertama ketika kejadian kebakaran yang masyarakat alami sendiri yang secara langsung masyarakat sudah dapat berupaya penyelamatan lebih awal sebelum kejadian menjadi lebih besar. Besar harapan data yang dikumpulkan yang telah menjadi Peta Rawan Bencana RT ini dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bontang dalam upaya penanggulangan bencana. Pasalnya, Peta Rawan Bencana RT ini dapat dimanfaatkan sebagai upaya pedoman atau data tunggal penanggulangan kebencanaan di wilayah sekitar Kota Bontang. Keikutsertaan masyarakat didalam pelaksanaan uji publik Peta Rawan Bencana RT diharapkan dapat menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana yang ada disekitar mereka. Mulai dari tahap pencegahan (Pra bencana) seperti memaksimalkan pelaksanaan simulasi kebencanaan pada setiap Kelurahan di Kota Bontang dengan melaksanakannya secara rutin berkala agar pengetahuan akan penanggulangan kebencanaan dapat diingat oleh masyarakat mengingat sifat bencana yang terjadi tidak bersifat terjadwal, pelatihan tim dapur umum dalam pemenuhan konsumsi selama bencana melanda yang menjadi faktor penting pada pelaksanaan penanggulangan kebencanaan harus ditingkatkan dalam intensitas pelatihannya karena mempengaruhi didalam kecepatan distribusi logistik, bahan dan pangan yang sangat diperlukan untuk masyarakat pada saat penanggulangan kebencanaan berlangsung.
5. Kebutuhan peralatan, bantuan, ataupun jasa pihak Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam membantu upaya penanggulangan kebencanaan di wilayah sekitar Kota Bontang harus membangun hubungan komunikasi yang lebih intens dan baik dengan mensosialisasikan impact keperdulian dari setiap pihak tersebut terhadap pengoptimalan Peta Rawan Bencana RT kepada mereka dengan merealisasikan pelaksanaannya dengan memberikan bantuan peralatan atau dana yang mereka peruntukkan untuk pengadaan barang, jasa atau peralatan yang

dapat menjadi stimulus terhadap proses penanggulangan kebencanaan yang dilaksanakan di daerah sekitar Kota Bontang sehingga aktifitas ataupun program kerja baik Pihak Pemerintah, Swasta dan Masyarakat lakukan dilingkungan daerah sekitar Kota Bontang tidak terhambat karena penanggulangan kebencanaan yang dilakukan menjadi tanggung jawab dan pekerjaan bersama semua pihak .

6. Sebagai Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi dalam penanggulangan kebencanaan sesuai dengan UU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2015. Dan sesuai dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 dan diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang yang dimana Peta Rawan Bencana RT sebagai produk dari BPBD Kota Bontang dalam membantu mitigasi kebencanaan di Kota Bontang dan sekitarnya sebaiknya setiap unsur jika masuk dalam permasalahan kebencanaan harus berpacu kepada komando dari BPBD Kota Bontang dengan memanfaatkan Peta Rawan Bencana RT ini sehingga menjadikan patroli terfokus didalam penanggulangan kebencanaan dan akhirnya pelaksanaan penanggulangan kebencanaan di Kota Bontang menjadi lebih efektif.

Daftar Pustaka

Buku

Analisis Kebijakan Publik. Oleh: Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.SI - PDF Download Gratis. (2017). Docplayer.info. https://docplayer.info/197333435-Analisis-kebijakan-publik-oleh-dr-drs-anak-agung-gede-oka-wisnumurti-m-si.html

Modul Pelatihan Analis Kebijakan | Batukarinfo. (2013). Batukarinfo.com. https://www.batukarinfo.com/referensi/modul-pelatihan-analis-kebijakan

Dokumen

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang

Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. (n.d.). https://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana. (2018). Regulasip.id. https://www.regulasip.id/book/2823/read

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved April 8, 2022, from http://partisipasiku.bphn.go.id/storage/1556267952_PARPUB_BPHN_AEpermendagri%20N0%20101%20Th%202018%20SPM.pdf

Berita Negara Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved April 8, 2022, from https://bnpb.go.id/uploads/24/peraturan-kepala/2012/perka-7-tahun-2012.pdf

Jurnal

Faturahman, B. M. (2018). *Konseptualisasi mitigasi bencana melalui perspektif kebijakan publik.* Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(2). https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2365

Andi Samsu Alam. (2016). *Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif.* GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 81–96. https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1133

Dessy Triana,Tb Sofwan Hadi,Muhammad Kamil Husain. (2013). *Mitigasi Bencana Melalui Pendekatan Kultural Dan Struktural* - PDF Free Download. Docplayer.info. https://docplayer.info/74692944-Mitigasi-bencana-melalui-pendekatan-kultural-dan-struktural.html

A. Syamsu Alam. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial Di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif.* Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(1), 81–96.

Triana, D., Hadi, T. S., & Husain, M. K. (2018). *Mitigasi Bencana Melalui Pendekatan Kultural dan Struktural.* Seminar Nasional XII "Rekayasa Teknologi Industri Dan Informasi 2017", 379–384. https://journal.itny.ac.id/index.php/ReTII/article/view/723

Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press